

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi non profit yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum yang dapat berupa peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidikan atau peningkatan mutu kesehatan dan lain-lain. Apabila dibandingkan dengan instansi lain, instansi pemerintah memiliki karakteristik tersendiri yang lebih terkesan sebagai lembaga politik daripada lembaga ekonomi. Akan tetapi, sebagaimana bentuk-bentuk instansi lainnya, instansi pemerintah juga memiliki aspek sebagai lembaga ekonomi. Instansi pemerintah melakukan berbagai bentuk pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di satu sisi, dan di sisi lain instansi ini harus melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penghasilan guna menutupi seluruh biaya tersebut.

Sebagaimana halnya perusahaan, instansi pemerintah juga berusaha untuk mencegah atau menghindari pemborosan dan hal-hal lain yang dianggap merugikan karena hal - hal demikian akan membawa pengaruh buruk bagi keuangan masing- masing instansi pemerintah. Untuk menjamin adanya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan ini, maka diperlukan suatu sistem akuntansi keuangan yang tepat dan benar-benar diterapkan dalam instansi tersebut. Sistem akuntansi keuangan dalam sebuah instansi pemerintah merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan, hal ini dikarenakan sistem

akuntansi keuangan dapat digunakan sebagai alat pengatur dan pengendalian untuk seluruh kegiatan keuangan.

Penerapan akuntansi keuangan bertujuan untuk mengatur dan melindungi kekayaan atau aset milik instansi yang bersangkutan. Dengan diterapkan sistem akuntansi keuangan diharapkan semua aktifitas instansi pemerintah dapat dijalankan dengan efisien, sesuai dengan kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah.

Akuntansi keuangan daerah merupakan suatu hal yang baru dalam akuntansi pemerintahan. Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia yang me"reformasi" berbagai hal termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Penerapan akuntansi keuangan daerah telah membawa konsekuensi logis berupa pelaksana penyelenggaraan pemerintah berdasarkan pemerintahan yang sehat. Pemerintah dan daerah memiliki wewenang untuk sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk peraturan daerah. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini yaitu SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual.

Sebagai sebuah konsekuensi logis dari amanah yang dicantumkan pada Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Menteri Dalam Negeri menerbitkan peraturan menteri yang

mengatur tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Peraturan yang dimaksud, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Akuntansi berbasis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (PSAP No.1 Paragraf 8). Dalam akuntansi akrual, informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang rinci mengenai aset dan kewajiban.

Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal, dapat dipertanggung jawabkan, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang. Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas pemerintah daerah.

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kampar menyusun dan melaporkan pertanggung jawaban APBD secara periode meliputi: Laporan Realisasi Anggaran (Lampiran 1), Neraca (Lampiran 2), Laporan Perubahan Ekuitas (Lampiran 3), Laporan Operasional (Lampiran 4), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Lampiran 5). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah. Setiap

entitas pelaporan keuangan daerah SKPD wajib menerapkan sistem dan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berbasis akrual.

Akuntansi menggunakan sebuah siklus akuntansi, artinya akuntansi terdiri dari berbagai tahapan tertentu dan setelah selesainya tahapan tersebut kegiatan akan berulang kembali sesuai dengan urutan tersebut. Adapun tahap-tahap yang ada dalam siklus akuntansi keuangan daerah adalah :

Pertama, yaitu mendokumentasikan transaksi keuangan ke dalam dokumen transaksi dan melakukan analisis transaksi. Transaksi merupakan kegiatan yang mengubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya memerlukan data atau dokumen atau bukti pendukung dalam kegiatan operasi suatu entitas.

Kedua, menjurnal transaksi yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran kas dicatat dalam jurnal umum. Transaksi yang menyebabkan penerimaan kas dicatat dalam jurnal khusus penerimaan kas, sedangkan transaksi yang menyebabkan pengeluaran kas dicatat dalam jurnal khusus pengeluaran kas.

Tahap ketiga adalah posting ke buku besar. Buku besar merupakan sebuah buku yang berisi kumpulan rekening atau perkiraan. Buku besar dilakukan oleh masing-masing pemegang kas bendahara rutin, pemegang kas bendahara proyek, pemegang kas bendahara gaji, dan bendahara penerima sesuai dengan rekening transaksi masing-masing. Buku besar ini berguna untuk mencatat rincian terpisah aktiva, kewajiban atau hutang ekuitas. Untuk mencatat rekening tertentu digunakan buku besar pembantu.

Tahap keempat, yaitu membuat neraca saldo, yaitu daftar saldo sementara akun buku besar pada saat tertentu.

Tahap kelima membuat jurnal penyesuaian agar laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan yang benar dan wajar, pada rekening tertentu dalam kelompok pendapatan, belanja, pembiayaan, dan neraca dilakukan penyesuaian sebagai akibat timbulnya hak dan kewajiban yang diperhitungkan pada tahun anggaran yang berkenaan.

Tahap keenam menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, adalah neraca saldo yang disusun setelah pembuatan jurnal-jurnal penyesuaian.

Selanjutnya tahap ketujuh, yaitu membuat laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dan membantu ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tahap kedelapan, adalah membuat jurnal penutup. Jurnal penutup ialah langkah yang dilakukan setelah laporan keuangan disusun. Jurnal penutup biasanya dilakukan akhir periode anggaran tahunan dengan menutup rekening pendapatan dan biaya.

Proses akuntansi yang dilakukan pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kampar adalah dengan membuat Buku Kas Umum. Dimana semua

transaksi yang terjadi baik penerimaan maupun pengeluaran kas dicatat dalam Buku Kas Umum. Kemudian dari Buku Kas Umum yang dibuat oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kampar membuat Laporan SPJ Belanja Fungsional dikarenakan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kampar sudah menggunakan sistem komputerisasi. Selanjutnya dibuat laporan realisasi anggaran maka proses akuntansi keuangan daerah pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kampar adalah membuat Neraca.

Adapun masalah yang ditemui pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kampar sebagai berikut :

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kampar tidak membuat jurnal yang memisahkan antara jurnal penerimaan dan pengeluaran kas, semua transaksi dicatat pada buku kas umum( BKU ). Buku Kas Umum adalah buku yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, mutasi kas dari bank ke tunai dan perbaikan atau koreksi/kesalahan pembukuan dibawah pengurusan bendahara yang harus dipertanggungjawabkan setiap saat.

Selanjutnya Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kampar belum melakukan penyusutan terhadap aset tetap yang dimiliki.

Selain itu, pada neraca per 31 Desember 2015 dan 2014 Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kampar aset lancar yang dilampirkan hanya investasi jangka panjang saja sedangkan untuk kas, piutang, bahkan persediaan tidak ada didalam neraca.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan mengambil judul:“**Analisis Penerapan**

## **Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kampar”.**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas, maka dalam hal ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

“Bagaimana kesesuaian penerapan Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kampar dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan akuntansi keuangan daerah pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kampar telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis, khususnya untuk bidang ilmu akuntansi secara umum dan bidang akuntansi keuangan daerah secara khususnya, dimana penulis dapat melihat secara langsung praktek akuntansi keuangan daerah yang diterapkan pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kampar.
- b. Bagi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kampar hasil penelitian ini merupakan masukan yang dapat digunakan untuk perbaikan dalam penyempurnaan pelaksanaan akuntansi keuangan daerah.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan atau bahan referensi terhadap penelitian selanjutnya dengan masalah yang sama pada tempat yang berbeda.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai penulisan ini agar dikembangkan sesuai dengan kerangka skripsi, penulis mencoba menguraikan pokok-pokok yang ada pada masing-masing bab sebagai berikut:

- BAB I : Bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Bab ini menguraikan landasan teori mendukung penelitian, uraian penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.
- BAB III : Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan yang terdiri dari lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV : Bab ini membahas mengenai gambaran umum Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kampar yang meliputi Tugas dan Fungsi masing-masing bagian serta Visi dan Misi pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kampar.
- BAB V : Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan terhadap laporan keuangan daerah pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kampar.



BAB VI : Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran- saran yang bermanfaat bagi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kampar.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau